

Kebijakan *Travel Warning* Australia dan Pengaruhnya Terhadap Minat Kunjungan Wisatawan Australia di Bali Periode 2002-2015

Andani Gita Ramadanti

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email : andanigita@yahoo.com

Abstract

This research departs from the problem of increasing Australian tourist visit to Indonesia especially Bali even though Australian government still apply travel warning policy. This is problematic when considering the fact that although Australia still implements a travel warning policy for its citizens to travel to Indonesia, it reveals an increase in tourist arrivals to Indonesia. Therefore, this research is descriptive explanative with the aim of studying and exploring various factors related to Australian travel warning policy towards Indonesia that affect the level of tourist visit to Indonesia especially in Bali. Researchers argue that travel warning is a manifestation of its own threat perception for the Australian government and Australian society in Indonesia. The data collected includes primary data and secondary data. Primary data by direct interview with Australian Consulate General in Bali and Bali Tourism Office, as well as Australian tourists in Bali. The collected data is analyzed by applying the results that the Australian public has its own public opinion that is expanding in view of the travel warning policies issued by the government.

Kata Kunci: *Travel warning, Perception Threat, Public Opinion, Tourist Visits.*

Pendahuluan

Australia dan Indonesia merupakan dua negara yang berdekatan secara geografis, namun memiliki banyak perbedaan baik dalam segi sejarah, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam sejarahnya hubungan kedua negara terkadang bersifat harmonis, namun juga bersifat statis. Sejarah mencatat hubungan kedua negara ini sering mengalami pasang surut terutama jika menyangkut mengenai permasalahan keamanan antar kedua negara. Seperti yang telah diketahui pada 2002-2005 terjadi beberapa aksi terorisme yang meresahkan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional, terutama Australia (Haryani, 2008: 335). Maraknya aksi terorisme di Indonesia dalam kurun waktu 2002-

2005 mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia, terutama mengenai kepercayaan Australia dengan Indonesia. Apalagi korban jiwa terbanyak dari aksi teror peledakan Bom Bali I dan Bom Bali II berasal dari Australia (88 korban jiwa). Kemudian disusul Indonesia dengan 35 korban jiwa, serta 23 korban jiwa dari Inggris. Sedangkan negara lainnya yang menjadi negara asal korban adalah Jepang, Korea, Taiwan, Jerman, Swedia, Switzerland, Netherlands, Prancis, Denmark, New Zealand, Brazil, Kanada, Afrika Selatan, Italia, Portugal, Polandia, Yunani, dan Ekuador (Putra & Hitchcock, 2008: 86). Hal ini semakin memperkuat keyakinan pemerintah Australia bahwa isi terorisme di Indonesia harus menjadi prioritas

utama dalam kebijakan pertahanan dan keamanan negaranya.

Maka sebagai tindak lanjut Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan reaktif terhadap Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh PM Howard pasca terjadinya Bom Bali I sebagai berikut;

“The first responsibility of the Australian government is to protect its citizens. It is unimaginable that a government in our position would do anything other than reflect current advice in travel warnings and issues. For so long as Australian lives may be endangered in traveling to anyone particular spot anywhere in the world, the Australian government has an obligation and will properly warn its people. We have issued a number of travel warnings about Bali and about Indonesia generally in recent times but in the wake of this terrible event they certainly have an added point.” (FreeRepublik.com)

Pernyataan diatas merupakan salah satu wujud kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dari sesuatu hal yang dianggap mengancam, yang kemudian direalisasikan dengan mengeluarkan kebijakan *travel warning* untuk Indonesia. Australia mengeluarkan kebijakan *travel warning* ini, bekerja sama dengan *Department of Foreign Affairs & Trade (DFAT)* dan *National Threat Assessment Centre (NTAC)* (Lo`wenheim, 2007: 206). Melalui kedua lembaga ini pemerintah Australia memberikan pemberitahuan dan saran keamanan perjalanan di negara tujuan bagi warga negara Australia. Pemberitahuan saran keamanan ini diterbitkan pada *smartraveller*, sebuah situs resmi Pemerintah Australia yang berisi informasi dan saran terkait keamanan suatu negara untuk dikunjungi.

Adanya aksi terorisme di Indonesia yang dibarengi pemberlakuan kebijakan

travel warning memberikan dampak terhadap tidak stabilnya kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia. Memang telah terjadi penurunan dalam beberapa periode tertentu, namun juga dibarengi dengan peningkatan yang cepat pada beberapa tahun berikutnya. Hal tersebut membuktikan bahwa peringatan kepada warga negara Australia untuk tidak mengunjungi Indonesia tidak mengurangi animo warga negara Australia ke Indonesia. Hal ini kemudian menarik untuk diteliti untuk mengetahui apa yang membuat pemerintah Australia seringkali bersikap sepihak dan mudah dalam mengeluarkan kebijakan *travel warning* terhadap

Indonesia yang sangat jelas hingga tahun 2015 ini tidak terdapat suatu ancaman besar yang terjadi di Indonesia yang mengancam keselamatan warga negara dan pemerintah Australia itu sendiri. Serta seberapa jauh *travel warning* merespon dan mempengaruhi minat kunjungan wisatawan ke Indonesia khususnya di Bali. Sehingga penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Kebijakan *Travel Warning* Australia

Travel warning dimengerti sebagai sebuah kebijakan berupa disiplin internasional (Lo`wenheim, 207:207). *Travel warning* merupakan kebijakan berupa pernyataan resmi pemerintah memperingatkan warganya terkait risiko atau melakukan perjalanan ke suatu negara atau wilayah tertentu yang dianggap tidak aman karena berbahaya. Sebagai sebuah kebijakan, tentu memiliki faktor-faktor pendukung dalam setiap perumusan kebijakan yang dibuatnya. Salah satu faktor tersebut yakni dari faktor keamanan regional dan internasional. Seperti adanya persepsi ancaman terjadi di Indonesia yang

dianggap mengganggu kepentingan dan keamanan negara dan warga negara Australia yang berada di Indonesia. Sehingga Australia berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dengan mengeluarkan kebijakan *travel warning*.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan *executive assistant* Konsulat Jenderal Australia di Bali persepsi ancaman yang dianggap dapat mengganggu keselamatan jiwa warga negaranya dalam berada di Indonesia yakni; (1) Ancaman terorisme, dimana merupakan ancaman keamanan bagi dunia. Australia menganggap Indonesia masih merupakan negara yang menjadi salah satu sasaran utama terorisme terutama Bali. Dalam peringatan kepada warganya, Australia menyatakan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori resiko sangat tinggi akan serangan teroris. Terutama setelah Pemerintah Indonesia memperingatkan bahwa target teroris kemungkinan besar orang asing. Serangan teroris di Bali dan Jakarta mengindikasikan bahwa daerah tersebut merupakan prioritas utama serangan teroris; (2) Buruknya perkembangan situasi dan kondisi politik internal di Indonesia, proses perpolitikan di dalam negeri yang terjadi di Indonesia serta dibarengi dengan proses demonstrasi anarki merupakan sering terjadi di Indonesia. Ditambah pula gejolak keamanan di berbagai daerah yang terjadi di Indonesia. Seperti di Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, merupakan daerah yang belum stabil dan rawan terhadap konflik sehingga dianggap menjadi ancaman bagi Australia;

(3) Kriminalitas, hal yang sering terjadi ditandai dengan tindak kejahatan dan pencurian yang semakin meningkat bahkan kekerasan juga mungkin terjadi. Selain itu, berbagai tindak kriminalitas lainnya yang diperingatkan oleh Pemerintah Australia kepada warganya seperti penipuan terhadap kartu kredit dan ATM, transportasi umum yang

ramai rawan akan pencurian, kasus pencurian dan perampokan yang dilakukan oleh sopir taksi juga menjadi perhatian dari Pemerintah Australia; (4) Lemahnya sarana infrastruktur seperti transportasi umum, termasuk bis, kereta api dan kapal feri merupakan sarana transportasi yang menurut Pemerintah Australia kurang terpelihara dan memiliki peralatan keselamatan yang terbatas; (5) Bencana alam, berbagai daerah di Indonesia merupakan titik rawan bencana, terutama bencana gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung merapi; (6) Permasalahan kesehatan, rendahnya standar fasilitas kesehatan di Indonesia termasuk fasilitas darurat serta kualitas pelayanan medis. Berkembangnya berbagai macam wabah penyakit di Indonesia juga menjadi perhatian Pemerintah Australia. Selain itu pula di Bali terdapat penyakit rabies yang baru-baru ini menyerang anjing yang berada di Bali. Serta penyakit flu burung adalah penyakit yang perlu di perhatikan secara serius. Melalui persepsi ancaman tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan *travel warning* Australia. Diimplementasikannya kebijakan *travel warning* ini, pemerintah Australia bekerja sama dengan *Department of Foreign Affairs & Trade (DFAT)* dan *National Threat Assessment Centre (NTAC)*. Melalui kedua lembaga ini pemerintah Australia memberikan pemberitahuan dan saran keamanan perjalanan di negara tujuan bagi warga negara Australia. Pemberitahuan saran keamanan ini diterbitkan pada *smartraveller* dan dapat diakses langsung oleh warga Australia.

1. PM John Howard (2001-2007)

PM John Howard sangat identik dengan kebijakannya luar negerinya yang anti terhadap Asia, sehingga menimbulkan kesan bahwa Australia ingin menjaga jarak dengan Indonesia. Ditambah pula Howard juga merepresentasikan dirinya sebagai deputy sheriff (AS). Dalam kebijakan *travel warning* pada masa PM Howard, menilai ancaman yang terjadi

di Indonesia dimulai dari adanya krisis moneter tahun 1997, Indonesia mengalami perubahan *image* yang mempengaruhi pada hubungan Australia-Indonesia. Kemudian berlanjut pada permasalahan Timor Timur yang menjadi batu sandungan antara Australia-Indonesia (Kelly, 2006: 15). Ditambah dengan permasalahan imigran ini membuat semakin buruknya hubungan antara Australia-Indonesia.

Serangkaian peristiwa tersebut dianggap menjadi ancaman bagi Australia ditambah ketika terjadinya peristiwa terorisme di Indonesia pada kurun waktu 2001-2005 Bom Bali I yang korban jiwa di dominasi berasal dari Australia, Bom di Depan Kedubes Australia, Bom Bali II. Walaupun adanya jalinan kerjasama keamanan terkait Polisi Federal Australia dengan Kepolisian Indonesia dalam permasalahan terorisme, adanya bantuan keamanan, hingga disepakatinya *Frame Work Agreement on Security Cooperation* atau *Lombok Treaty* tahun 2006 namun Australia masih mengeluarkan kebijakan *travel warning* terhadap Indonesia sebagai antisipasi untuk melindungi negara dan warga negaranya terkait serangkaian permasalahan di Indonesia yang dianggap menjadi ancaman pada pemerintahan John Howard. Kebijakan *travel warning* pada masa pemerintahan PM Howard juga di dipengaruhi oleh sikap arogan dan tidak sensitif terhadap Indonesia yang cenderung memandang Indonesia selalu bermasalah (Mar'iyah, 2005: 13). Adanya sikap PM Howard tersebut menjelaskan alasan yang mendasari seringnya pemberlakuan kebijakan *travel warning* ke Indonesia.

2. PM Kevin Rudd (2007-2012) (2013-2013)

Tidak berbeda dengan rezim John Howard yang digantikannya dalam memandang masalah teroris di Indonesia. Bagi Pemerintahan Kevin Rudd, Indonesia tetaplah sebuah negara “tidak aman” dan masih dianggap

menjadi ancaman bagi para warga negaranya untuk secara bebas dikunjungi, walaupun rekam jejak kesuksesan Indonesia dalam menumpas jaringan terorisme mendapat pengakuan dunia (The Australian.com). Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tetap mengelompokkan Indonesia ke dalam 15 negara di dunia yang patut diwaspadai setiap warga negaranya sebelum memutuskan untuk berkunjung. *Warning* dalam melakukan perjalanan yang diberlakukan DFAT pada masa pemerintahan Kevin Rudd yakni masih berada level empat (*reconsider you need to travel*) berada satu tingkat di bawah level lima (*do not travel*). Makna di balik peringatan perjalanan level empat itu adalah setiap warga Australia yang berniat berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia diminta untuk “mempertimbangkan kembali” rencana mereka itu karena alasan keamanan (ancaman terorisme).

Pada masa pemerintahan PM Kevin Rudd ini, melalui NTAC badan pusat penilaian ancaman nasional Australia masih terus menerima laporan-laporan yang mengindikasikan adanya rencana serangan teroris pada tempat-tempat yang ramai dikunjungi wisatawan asing. Hal ini memperlihatkan faktor ketakutan dalam persepsi ancaman pemerintah Australia sangat mendominasi dalam pemberlakuan kebijakan *travel warning* di Indonesia. Ditambah pula media Australia pun umumnya selalu memelihara rasa takut publik negara itu dengan memberikan ruang bagi isu-isu radikalisme dalam Islam (The Australian.com). Bidang kerja sama di tingkat masyarakat, seperti program pertukaran siswa dan guru, riset dan pendidikan, bisnis dan pariwisata adalah sektor paling dirugikan oleh pemberlakuan *travel warning*.

3. PM Julia Gillard (2010-2012)

Pada masa pemerintahan Julia Gillard ingin memfokuskan posisi Indonesia untuk mendekatkan diri dengan Asia.

Sementara itu pandangan Gillard terhadap Indonesia masih dianggap menjadi ancaman hingga masih perlunya diberlakukannya kebijakan *travel warning*. Permasalahan keamanan dan terorisme di Indonesia masih dianggap menjadi suatu ancaman bagi negara Australia dan warga negaranya. Di akhir masa pemerintahannya, DFAT mengeluarkan *travel warning* bagi warganya yang hendak melakukan perjalanan ke Bali, menyusul ditembak matinya lima teroris di sana. *Travel warning* yang diberikan berada pada tingkat empat (*reconsider your need to travel*) dengan memberi pertimbangan kepada warga Australia untuk melakukan perjalanan ke Indonesia, termasuk Bali, karena tingginya ancaman serangan teroris. Walaupun di masa pemerintahan Gillard mengapresiasi kepolisian Indonesia dalam menangkap para pelaku teroris dalam serangkaian Bom yang terjadi di Indonesia, namun ketakutan dan kekhawatiran yang dianggap mengancam belum dihilangkan dari persepsi Australia sehingga masih diberlakukannya pula kebijakan *travel warning*.

4. PM Tony Abbott (2013-2015)

Pada dasarnya pemerintahan Tony Abbott menekankan konsep *people-to-people* dalam melakukan politik luar negeri. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Australia. Pada masa pemerintahan Tony Abbott banyak terjadi ketegangan antara Indonesia dan Australia di tahun 2013. Australia kerap kali membalas tindakannya dengan memberlakukan kebijakan *travel warning* ke Indonesia. Penambahan isu-isu baru yang dianggap sebagai ancaman bagi Australia seperti misalnya perkembangan politik, proses, dan demonstrasi merupakan hal yang sangat sering terjadi di masa pemerintahan Abbott. Kemudian isu mengenai kasus dua terpidana mati *Bali Nine* tahun 2015, dimana pihak Australia sangat mengecam tindakan yang dilakukan Indonesia terhadap dua terpidana kasus

gembong narkoba tersebut dan memberlakukan *travel warning* terhadap Indonesia. Mengesankan jika *travel warning* hanya dijadikan alat bagi Australia untuk membuat Indonesia tunduk terhadap segala kebijakannya. Kemudian pula isu mengenai kesehatan di Indonesia seperti saat merebaknya isu virus Zika yang sudah sangat jelas Indonesia menyatakan tidak terjangkit wabah ini namun hingga saat ini pemerintah Australia belum pernah mencabut kebijakan *travel warning* terhadap Indonesia. Dan hingga kini masih belum terdapat kejelasan sampai kapan kebijakan itu akan dicabut.

Serangkaian persepsi ancaman tersebut yang dijadikan dasar pemerintah Australia dalam memberlakukan kebijakan *travel warning* ke Indonesia hingga tahun 2015 ini. Selama kurun waktu 2002-2015 ini himbauan dalam sebuah *travel warning* Australia memuat tingkatan-tingkatan tertentu yang mengindikasikan tingkat risiko keamanan yang mungkin dihadapi warga negara selama melakukan kunjungan wisata terhadap wilayah yang diberlakukan *travel warning* tersebut.

Tingkatan Travel Warning beserta bobot masing-masing

Tingkatan	Jenis	Bobot
1	Be Alert To Own Security	5
2	Exercise Caution	4
3	High Degree Of Caution	3
4	Reconsider Your Need To Travel	2
5	Do Not Travel	1

Sumber : olahan peneliti dari smartaveller.gov.au

Pembagian Area Travel Warning di Indonesia



Sumber : smartraveller.gov.au

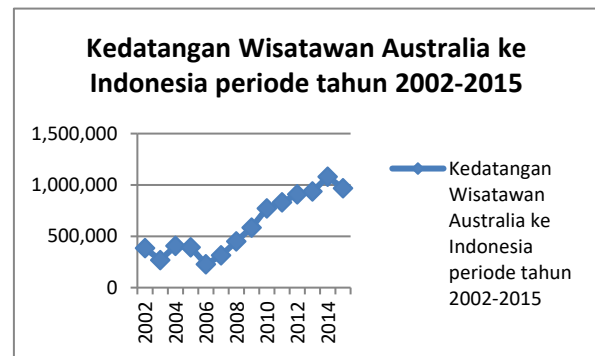
Pada peta pembagian area pemberlakuan *travel warning* diatas dapat dijelaskan bahwa hingga saat ini secara keseluruhan wilayah yang ada di Indonesia dikategorikan berada dalam level tiga (*high degree of caution*) dalam kebijakan *travel warning* Australia. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat karena merupakan daerah rawan terhadap gejolak konflik yang dianggap akan sangat mengancam keselamatan berkunjung bagi warga negaranya. Kebijakan *travel warning* ini juga diberlakukan dengan jangka waktu yang panjang, dimana belum pernah dicabutnya kebijakan *travel warning* Australia terhadap Indonesia. Australia hanya menurunkan tingkat indikasi bahaya dalam pemberlakuan *travel warning* di Indonesia.

Opini Publik Masyarakat Australia Merespon Kebijakan Travel Warning

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya *travel warning* dikeluarkan

pemerintah Australia sebagai tindakan reaktif untuk serangkaian ancaman terkait peristiwa terror, kekerasan, ancaman politik, bencana alam hingga permasalahan kesehatan yang terjadi di Indonesia. Namun kenyataannya kebijakan tersebut terkesan tidak berlaku dipedulikan oleh warga negaranya. Terbukti walaupun masih diberlakukan kebijakan *travel warning*, namun kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia khususnya Bali mengalami peningkatan.

Kedatangan Wisatawan Australia ke Indonesia periode tahun 2002-2015



Sumber: Olahan peneliti dari Data Statistik Kunjungan Wisatawan Disparda Bali

Berdasarkan hasil wawancara langsung mendalam yang peneliti lakukan dengan 10 orang warga negara Australia di Bali, peneliti merangkum opini kesepuluh wisatawan tersebut yakni dikarenakan pada dasarnya; pertama, murah biaya perjalanan ke Bali dan pemenuhan hidupnya di Bali; kedua warga negara Australia merasa nyaman tinggal di Bali hingga tiga bulan bahkan lebih; ketiga, jarak tempuh yang dekat antara Bali dan Australia, sekitar 3-7 jam perjalanan melalui udara; keempat, warga negara Australia menganggap Bali sebagai *second home* rumah kedua bagi mereka karena keunikan Pulau Bali ataupun hanya untuk berlibur dan warga negara Australia memahami betul kondisi yang ada di Bali. Dan didapatkan bahwa sebagian besar wisatawan Australia yang berkunjung ke Bali ada pada kelompok umur (20-29 tahun) dan rentan umur

(30-39 tahun) (Pitana & Gayatri, 2005: 74).

Ancaman yang dikatakan pemerintahnya seperti masalah keamanan, perpolitikan, kekerasan, hingga masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia wisatawan Australia tidak merasakan hal tersebut ketika berkunjung ke Indonesia khususnya Bali. Jika melihat faktor keamanan tersendiri, Bali khususnya sangat menjamin hak keselamatan bagi warganya ataupun para wisatawan. Sehingga hampir jarang ada warga negara (Pemayun, 2017). Kemudian jika dikatakan mengenai permasalahan kesehatan seperti yang pernah muncul mengenai *rabies* dan virus Zika hingga yang menyebabkan Australia harus mengeluarkan *travel warning* ke Bali, hal tersebut pula telah dibuktikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali bahwa terbukti tidak ada virus Zika yang masuk di kawasan Bali, sedangkan mengenai *rabies*, memang ada ketakutan dari warga negara Australia namun hal tersebut hanya bersifat sementara karena juga dibarengi kampanye pemberian vaksin secara keseluruhan di provinsi Bali untuk penanganan *rabies* ini.

Salah satu wisatawan Australia juga menambahkan, jika menanggapi ancaman teror di Indonesia khususnya di Bali, memang dirasa hal itu sangat perlu di waspadai bagi warga negara Australia, namun hal tersebut dirasa berlebihan jika dalam jangka panjang kebijakan tersebut masih diberlakukan. Dari beberapa wisatawan Australia yang peneliti ajak untuk melakukan wawancara langsung mendalam terkait pandangannya dalam menyikapi kebijakan *travel warning* yang dibuat pemerintahnya. Hampir semua jawabannya tidak terlalu menyikapi *travel warning* pemerintahnya. Hal itu dikarenakan adanya faktor motivasi terkait minat kunjungan wisatawan Australia ke Bali, dimana Bali hingga saat ini masih merupakan destinasi utama untuk berlibur. Adapun faktor motivasi terbanyak yang menjadi alasan bagi warga negara Australia untuk

berlibur ke Bali yakni motivasi fisik dengan melihat Bali sebagai tempat yang nyaman untuk berlibur, penyegaran terhadap tubuh, pikiran, kesenangan jasmani dan rohani (Pitana & Gayatri, 2005: 60). Kemudian motivasi budaya dan alam, hampir semua wisawatan masih memuji keindahan alam yang asri dan budaya yang kental menjadi daya tarik wisatawan Australia berlibur dan menghabiskan waktunya berada di Bali dan menjadikan Bali sebagai *second home*.

Berbeda hal nya dengan pemerintahnya Australia, warga negaranya memiliki persepsi ancaman yang terbentuk dalam opini publik warga negara Australia yakni dengan adanya; (1) kemacetan, dimana titik rawan kemacetan seperti Kuta, Seminyak, By Pass Ngurah Rai untuk arah ke bandara dan Jimbaran menjadi hal yang sering dikeluhkan oleh wisatawan Australia; (2) masalah kebersihan lingkungan dalam hal ini penanganan sampah masih menjadi problematika dalam pariwisata di Bali. Wisatawan juga masih mengeluhkan mengenai permasalahan ini, seperti banyaknya sampah pada daerah-daerah wisata yang tidak dikelola dengan baik; dan (3) kurangnya infrastruktur yang memadai, terutama seperti kurangnya akses jalan untuk menuju daerah tujuan wisata.

Disamping itu pula, persepsi ancaman juga dipengaruhi oleh beberapa peran dari lembaga-lembaga yang turut berkontribusi dalam membangun opini publik warga negara Australia. (1) Peran *Australia-Indonesia Institute* (AII), perbedaan opini terhadap persepsi ancaman yang terjadi di Indonesia khususnya terhadap Bali dipengaruhi pula oleh lembaga *Australia-Indonesia Institute* (AII) ini. Beberapa wisatawan Australia ketika diwawancarai menyebutkan AII sebagai lembaga untuk menggali informasi lebih terkait situasi nyata yang ada di Indonesia khususnya Bali. AII yang didirikan pada 1989 berperan sebagai wadah pengumpulan, pertukaran dan

penyebaran informasi serta merupakan sumber saran untuk mendukung, mempererat serta mengembangkan hubungan antara masyarakat Australia dan Indonesia. AII mengedepankan konsep *people-to-people*, mengakibatkan masyarakat Australia dapat menganalisa sendiri tingkat resiko *travel warning* yang dikeluarkan pemerintahnya secara objektif dan realistis. Salah satu program AII yakni program antar kepercayaan dengan melakukan pertukaran kaum muslim untuk mendukung pengertian yang lebih besar tentang peran agama di masing-masing negara. Tujuan program ini adalah untuk menunjukkan pada masyarakat dari masing-masing negara untuk membuang kesalahan persepsi atau kecurigaan yang telah terbangun di antara kedua negara (Mercer, 2005). (2) *Visit Indonesia Tourism Officer* (VITO) di Australia VITO diharapkan akan selalu proaktif mensosialisasikan dan mempromosikan kebijakan baru tersebut sesuai perannya sebagai *brand ambassador* pariwisata Indonesia dengan melakukan komunikasi, interaksi dan menciptakan kerjasama strategis bersama pelaku penting di pasar sasaran. Strategi VITO yakni salah satunya dengan *Sales Mission* guna meningkatkan minat kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia khususnya Bali walaupun masih diberlakukannya *travel warning* Australia (JakartaGlobe.id). (3) *Bali Tourism Board* (BTB), BTB memiliki tekad untuk membangun kepariwisataan Bali dan Indonesia pada umumnya ke arah yang lebih sempurna dan berkesinambungan. BTB memposisikan diri sebagai wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi bagi kepariwisataan, masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan posisi BTB tersebut sangat memberi kemudahan bagi warga negara Australia yang ingin berkunjung atau sedang berada di Bali (BaliTourismBoard.or.id).

Ketidakefektifan Kebijakan Travel Warning dalam Penerapan Kebijakan di Bali

Pada prakteknya sendiri kebijakan *travel warning* tidak memberikan dasar hukum yang mengikat bagi siapa pun yang tidak mentaatinya. Menurut Fahmi (2017) menjelaskan bahwa saat ini kebijakan *travel warning* Australia di Indonesia masih diberlakukannya hanya sebataas *warning* supaya ada seleksi alam dari warga negaranya yang berkunjung ke Indonesia khususnya Bali. *Warning* yang diberikan ini bertujuan agar warga negaranya diberikan sebagai peringatan bukan sebagai larangan. Dengan tidak adanya hukum mengikat ditambah pula adanya sekelompok warganya negara Australia yang mencintai Bali sebagai *second home* yang perlu dijaga. Maka berkembang opini-opini dalam memandang kebijakan *travel warning* yang dikeluarkan oleh pemerintahnya seperti misalnya pendiri group *Bali Clean and Green Province*, Matthew Ellks merupakan warga negara Australia pula yang menyatakan tidak setuju dengan diberlakukannya kebijakan *travel warning* terhadap Indonesia khususnya Bali. Menganggap *travel warning* dijadikan sebagai alat propaganda membuat warga negara Australia memiliki pemikiran negatif terhadap muslim.

Pemberitaan negatif terkait kondisi di Indonesia yang dikeluarkan melalui kebijakan *travel warning*, semakin dianggap berlebihan dan tidak relevan bagi warga negara Australia yang pada dasarnya mengerti betul kondisi di Bali bahwa aman untuk dikunjungi. Kehadiran *group* ini bukan sebagai penentang dalam kebijakan yang di keluarkan negaranya. Namun *group* ini memiliki cara pandang tersendiri terhadap kondisi pariwisata di Bali. *Group* ini berisikan orang-orang Australia yang sebagian besar telah menerap tinggal di Bali atau berkunjung di Bali dalam jangka waktu yang lama. Sehingga adaya *group* seperti ini dapat dijadikan wadah untuk memberikan informasi terkini dengan benar terkait keamanan bagi ada warga negara Australia yang ada di Bali tanpa harus membesar-besarkan dan melebihkan-

lebihkan dalam pemberian informasi tersebut.

Upaya Pemerintah Bali untuk Menjaga Kepariwisata Bali

Dari serangkaian peristiwa hingga masih diberlakukannya kebijakan *travel warning* di Bali, tentunya Bali berusaha untuk memberikan peningkatan kualitas Pariwisata Bali yakni melalui pendekatan lima dimensi kualitas yang harus tetap diperhatikan yakni, (1) bukti langsung (*tangibles*); (2) keandalan (*reliability*); (3) daya tanggap (*responsiveness*); (4) jaminan (*assurance*); (5) *empathy* (Rai, 2013: 14). Disamping itu (Pemayun, 2017) menyatakan bahwa Pemerintah Bali Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah mengupayakan segala hal menjaga kepariwisataan di Bali yakni meliputi; (1) Bidang Hukum dan Keamanan dengan membentuk Dewan Keamanan Bali serta meningkatkan kualitas satuan keamanan di Bali; (2) Bidang Lingkungan dengan pengembangan Desa Sadar Lingkungan (DSL); (3) Bidang Sosial dan Budaya mengantisipasi kebijakan *travel warning* Australia Dinas Pariwisata Bali bersama *stakeholder* seperti GIPI membuat langkah-langkah untuk mengantisipasi *travel warning* ini termasuk juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Juga melaksanakan *FAM Trips* atau *Familiarization Trips* dengan mengundang para jurnalis dari Australia mengadakan dialog dengan instansi dan *stakeholders* yang ada di Bali; (4) Bidang Ekonomi, Perbaikan ekonomi dengan merealisasikan Bandara di atas air di Bali Utara, telah dibangunnya JDP (Jalan Diatas Perairan) dan *Underpass*. Perbaikan ekonomi juga ditunjang dari keberhasilan promosi yang dilakukan Pemerintah Bali dan bekerjasama dengan para pelaku usaha (*stakeholders*). Seperti promosi yang dilakukan saat mengikuti pameran luar negeri seperti ITB Berlin, WTM London, JATA Jepang, dan lain lain; dan (5) Menghadirkan dan Meningkatkan

Kualitas Festival Tahunan Sebagai Daya Tarik Wisata.

Dengan adanya berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah cukup berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata yang begitu pesat di Bali. Hal itu pula yang menjadi *respect* warga negara Australia yang memiliki pandangan positif terkait kebijakan *travel warning* yang dibuat pemerintahnya bahwa merasa terlindungi dan dilayani dalam berada di Bali. Terbukti dengan meningkatnya kunjungan wisatawan tiap tahun serta semakin berkembangnya sarana wisata. Hal terpenting dari perkembangan pariwisata sekarang ini adalah tetap menjaga citra Bali yang positif di dalam maupun di luar negeri serta dapat membantu perekonomian masyarakat dan negara.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun secara geografis letak kedua negara berdekatan, akan tetapi hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia kerap kali menimbulkan pertentangan. Diberlakukannya *travel warning* kepada Indonesia sejak tahun 2002-2015 dengan tujuan untuk melindungi warga negaranya dari berbagai ancaman terutama serangan teroris. Dalam menyikapi kebijakan *travel warning* ini juga tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan persepsi ancaman dari pemerintah Australia dengan masyarakat Australia. Dimana pandangan Pemerintah Australia menganggap bahwa Indonesia masih rentan terhadap aksi terorisme. Ancaman lainnya yakni dengan proses perkembangan politik yang memicu respon demonstrasi anarki merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia. Selain itu, situasi keamanan di berbagai daerah dalam faktor kemiskinan yang sangat tinggi memicu adanya kejahatan dan masih banyaknya terjadi kekerasan di beberapa daerah dengan tingkat kriminalitas sehingga tingginya angka terorisme, kriminalitas dan rendahnya

keamanan sipil dan politik, kesehatan, transportasi maupun keadaan alam semakin memperkuat sikap Pemerintah Australia untuk memberlakukan *travel warning* terhadap Indonesia.

Seringnya pengeluaran *travel warning* secara sepihak terhadap pemerintah Indonesia, mengakibatkan pemberian citra buruk terhadap pemerintah Indonesia. Untuk kurun waktu tertentu memang kebijakan *travel warning* telah memberi dampak terhadap penurunan kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia khususnya Bali. Hal itu tidak berlangsung lama, dapat dibuktikan walaupun pemerintahnya kerap mengeluarkan kebijakan *travel warning* terkait ancaman di Indonesia hingga kini, animo masyarakat Australia tetap berkunjung ke Bali. Dikarenakan warga negaranya memiliki perspsi tersendiri yang berbeda dengan pemerintah terkait ancaman (1) kemacetan; (2) kebersihan; (3) infrastruktur. Dan opini yang berkembang di masyarakatnya dalam menilai pariwisata di Bali sendiri yaitu; pertama, biaya yang murah dalam melakukan perjalanan ke Bali; kedua, warga negara Australia merasa nyaman tinggal di Bali hingga tiga bulan bahkan lebih; ketiga, jarak tempuh yang dekat antara Bali dan Australia, sekitar 3-7 jam perjalanan melalui udara; keempat, warga negara Australia menganggap Bali sebagai rumah kedua bagi mereka karena keunikan Pulau Bali ataupun hanya untuk berlibur. Beberapa dari kelompok yang memiliki opini tersendiri terhadap kebijakan *travel warning* ini memiliki *group* bersama dalam

penyaluran informasi yang riil terkait kondisi yang ada di Bali khususnya.

Pemerintah Indonesia khususnya Bali juga sangat menjamin mengenai permasalahan keamanan bagi siapa saja warga yang berada di Bali. Pemerintah Provinsi Bali juga telah melakukan upaya dalam menjaga kepariwisataan untuk layak dan betah untuk dikunjungi oleh warga negara Australia. Yakni dengan cara peningkatan kualitas Pariwisata Bali yakni melalui pendekatan lima dimensi kualitas yang harus tetap diperhatikan, kelimaanya disajikan secara berurutan berdasarkan nilai pentingnya menurut pelanggan yaitu; (1) bukti langsung (*tangibles*), (2) keandalan (*reliability*); (3) daya tanggap (*responsiveness*); (4) jaminan (*assurance*); (5) *empathy*. Peneliti sendiri melihat dengan sepihaknya dibuat kebijakan *travel warning* Australia dan tidak ada suatu isu signifikan yang terjadi Indonesia, hal ini memperlihatkan kurang kuatnya posisi Indonesia dibandingkan dengan Australia membuat telah Indonesia seakan dikendalikan oleh Australia. Australia tidak sepenuhnya salah dalam membuat kebijakan *travel warning* terhadap Indonesia karena sebagai entitas negara Australia berhak untuk melakukan apa saja untuk menjaga keamanan masyarakatnya. Namun melihat situasi Indonesia yang 156relative kondusif, mungkin memang sudah saatnya bagi pemerintah Australia untuk, setidaknya, menurunkan level peringatan kunjungan ke Indonesia atau menggantinya dengan jangka pendek.

Daftar Pustaka

- [1] Haryani, Silvia. "Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia: Perbandingan Antara Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono" Vol. 21 - No. 4. 2008. 352-360
- [2] Kelly, Paul. Howard's Decade, Lowy Institute for International Policy. (Sydney: Longueville. 2006)
- [3] Lo'wenheim, Oded. "The Responsibility to Responsibilize: Foreign Offices and the Issuing of Travel Warnings" *International Political Sociology*. Vol.12 ..- No 1. 2007. 203-221
- [4] Mar'iyah, Chusnul,. "Indonesia Dalam Transisi dan Demokrasi Konstitusional: Tantangan Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Australia" dalam *Indonesia-Australia Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. (Jakarta : Granit. 2005)
- [5] Mercer, Beverly. "Challenges to Bilateral Relations" dalam *Indonesia-Australia Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. (Jakarta : Granit. 2005)

- [6] Pitana, I Gede dan Putu G. Gayatri. *Sosiologi Pariwisata*. (Yogyakarta: ANDI. 2005)
- [7] Putra, I N Darma. dan Michael Hitchcock. "Terrorism and Tourism in Bali and Southeast Asia", *Tourism in Southeast Asia*. (Denmark: NIAS Press. 2008)
- [8] "Bali Tourism Board" *Bali Tourism Board.or.id*. Tersedia dalam <http://balitourismboard.or.id/>, Diakses 4 Juni 2017
- [9] "Indonesia travel warning still on". *The Australia.com.au*. Tersedia :<https://theaustralian.com.au/archives/news/indonesia-travel-warning-still-on-story>. Diakses 30 Mei 2017
- [10] "Tourism Ministry Prepares Second Round of Promotional Sales Mission to Australia". *JakartaGlobe*. Tersedia: <http://jakartaglobe.id/news/tourism-ministry-prepares-second-round-promotional-sales-mission-australia/>. Diakses 5 Juni 2017
- [11] "Transcript of PM's Comments on Bali Attacks, 13 October 2002". *FreeRepublic.com*. Tersedia: <http://www.freerepublic.com/focus/news/7>. Diakses 15 Februari 2017
- [12] "View Advice to Indonesia". *Smarttraveller.gov.au*. Tersedia: <http://www.smarttraveller.gov.au/zw-cgi/view/advice/Indonesia>. Diakses 1 Maret 2017
- [13] Australia, Wisatawan. "Kebijakan Travel Warning dan Pengaruhnya Terhadap Minat Kunjungan Wisatawan Australia di Bali". Wawancara oleh Andani Gita secara langsung (Denpasar, 5 Juni 2017)
- [14] Nugraha, Gita Fahmi. "Kebijakan Travel Warning Australia dan Pengaruhnya Terhadap Minat Kunjungan Australia di Bali". Wawancara oleh Andani Gita, secara langsung (Denpasar, 5 Juni 2017).
- [15] Pemayun, Tjokorda Bagus. "Kebijakan Travel Warning Australia dan Pengaruhnya Terhadap Minat Kunjungan Wisatawan Australia di Bali" Wawancara oleh Andani Gita secara langsung (Denpasar, 29 Mei 2017).